

Pancaragam Surabaya Tempo Dulu: Perjuangan Kelas, Simbolisme Kota, dan Fluktuasi Ekonomi

Endi Aulia Garadian

Komunitas Rembukan Penggiat Sejarah (REMPAH)

andigaradian@gmail.com

Purnawan Basundoro. 2013. *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Jakarta: Marjin Kiri. xiv + 338 hlm. ISBN: 978-979-1260-22-0

Sarkawi B. Husein. 2010. *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan (Surabaya, 1930-1960)*. Jakarta: LIPI Press. xxxv + 205 hlm. ISBN: 978-979-799-543-0

Howard W. Dick. 2003. *Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*. Singapore: NUS Press. xxx + 546 hlm. ISBN: 0-89680-221-3

Tiga buku yang ditinjau ini memberikan gambaran penting bagaimana Surabaya menjadi ruang kontestasi multi-dimensional antar kepentingan, baik dari aspek sosial, politik hingga ekonomi. Buku pertama, *Merebut Ruang Kota*, berhasil mengungkap bagaimana orang-orang miskin perkotaan terus diombang-ambing ketidakpastian dalam perebutan ruang kota. Mulai dari zaman kolonial, zaman kemerdekaan, hingga masa keruntuhan Orde Lama, orang-orang miskin perkotaan jarang sekali menang melawan kekuatan-kekuatan besar yang ada di perkotaan. Lebih jauh, buku ini memperlihatkan bahwa hanya dalam beberapa episode sejarah saja rakyat miskin di Surabaya bisa menang bertarung melawan pengusaha yang berkoalisi dengan penguasa.

Buku kedua, *Negara di Tengah Kota*, berhasil memberikan imajinasi kepada para pembacanya bagaimana Surabaya, sebagai sebuah ruang kota (*urban space*), terus berubah-ubah mengikuti perubahan rezim yang berkuasa. Ruang kota dijadikan tempat bagi para penguasa rezim sebagai arena “unjuk gigi” sekaligus sebagai ruang untuk membentuk ingatan kolektif di masyarakat akan kekuasaan sebuah rezim. Karena begitu kosmpolitnya Surabaya, banyak penguasa yang ingin “meninggalkan jejak” di kota ini dalam berbagai bentuk simbol

kota. Oleh karenanya, secara morfologis, kota Surabaya termasuk salah satu kota yang paling dinamis ketimbang kota-kota lain di Indonesia.

Menggunakan perspektif ekonomi-historis, buku terakhir yang ditinjau, *Surabaya, City of Work*, menjadi pelengkap dua buku sebelumnya. Selain menjadi karya alternatif tentang studi ekonomi perkotaan yang sangat Jakarta-sentris, buku ini patut diapresiasi karena telah memberikan gambaran jelas mengenai fluktuasi ekonomi yang terjadi sepanjang satu abad Surabaya. Hal ini, pada gilirannya, menimbulkan persoalan-persoalan kompleks, beberapa di antaranya telah digambarkan dua buku di atas. Selain itu, dinamika ledakan ekonomi yang terjadi di Surabaya dari masa ke masa juga menjadi salah satu alasan yang mengakibatkan fenomena urbanisasi di Surabaya sangat semarak bila dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, termasuk juga Jakarta.

Secara umum, esai tinjauan ini ditulis untuk memperlihatkan literatur-literatur penting yang patut dibaca bagi siapapun yang ingin mengkaji Surabaya. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia saat ini, sejarah kota Surabaya bisa diulik dari berbagai macam perspektif: *urban economic* (Fujita, 2003), *urban symbolism* (Nas, 1993), dan *urban frontier* (Smith, 2005). Bahkan, yang mengesankan, sekalipun dieksploitasi dan ditulis berulang kali, penulisan sejarah kota Surabaya tidak pernah kehilangan daya tariknya selama dua dekade terakhir ini.

Mengapa Surabaya?

Satu pertanyaan fundamental yang perlu dijawab adalah mengapa Surabaya dipilih menjadi lokus kajian oleh Basundoro, Husain, dan Dick? Sebelumnya, satu fakta yang patut diketahui adalah pada tahun 1900an—atau dikenal juga dengan periode kolonial akhir—kota menjadi sebuah indikator masyarakat modern di wilayah-wilayah Asia. Di kisaran tahun tersebut, investasi besar-besaran dalam skala global tengah terjadi di kota-kota potensial di dunia. Saat itu, bangunan-bangunan megah mulai dibangun, sektor-sektor industri mulai dipusatkan ke daerah kota-kota besar, dan lalu lintas pengusaha asing sudah menjadi hal yang lumrah.

Surabaya, karena satu dan lain hal, menjadi salah satu kota penting dan terbesar kala itu. Bahkan, dengan moda transportasi yang relatif lengkap seperti jalur kereta, pelabuhan yang mampu menampung banyak kapal, Surabaya berhasil menjadi salah satu kota pelabuhan terbesar di Asia bersandingan dengan Calcutta, Rangoon, Singapore, Bangkok, Hong Kong, dan Shanghai. Berbagai macam aktivitas-aktivitas perekonomian di atas dapat ditemukan di Surabaya pada tahun 1900an awal. Lebih-lebih, berkat komoditas gula, Surabaya menjadi kota paling besar transaksi ekonominya ketimbang kota-kota lain, termasuk Jakarta. Konstruksi pabrik gula pun menjadi sangat massif di Surabaya, karena, sebagai salah satu kota pengekspor gula, Surabaya harus bisa menjawab kebutuhan konsumsi gula masyarakat dunia.

Gempita kota Surabaya tersebut mengakibatkan banyak perubahan struktur sosial. Beberapa perubahan yang dapat dilihat antara lain kelas menengah yang mulai bermunculan di kampung-kampung yang terdekat dari Surabaya. Selain itu, orang-orang dari luar Surabaya pun mulai berdatangan ke kota ini guna memperebutkan sumber-sumber perekonomian yang menjanjikan. Urbanisasi menjadi tak terbendung.

Tentu saja, pada perkembangan selanjutnya, sumber daya ekonomi yang besar tersebut menjadi pemicu persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat kota Surabaya. Permasalahan kesenjangan ekonomi antara rakyat miskin dan kaya, monopoli sumber daya yang dilakukan negara, hingga gagalnya pemerintah dalam menyulap ruang kota menjadi ruang yang ramah bagi semua elemen di masyarakat agaknya menjadi sangat mudah ditemukan di Surabaya.

Alasan-alasan di atas menjadi jawaban mengapa para penulis yang bukunya sedang direviu ini memilih Surabaya sebagai lokus kajian. Selain Surabaya menjadi salah satu kota

kosmopolit, kota ini juga kerap menghadirkan episode-episode atraktif yang terjadi diantara kelas sosial, antara masyarakat dan negara, dan antar negara dengan negara saat terjadi perpindahan dan transisi kekuasaan di Surabaya.

Berebut Ruang dan Perjuangan Miskin Perkotaan

Fenomena kaum miskin perkotaan (*urban poor*) muncul di era industrialisasi yang tengah melaju kencang. Tercatat, pada tahun 1900an—terutama setelah depresi ekonomi global di tahun 1930 terjadi—jumlah miskin perkotaan meningkat pesat di banyak kota di Asia. Ironisnya, tiga puluh tahun silam merupakan masa puncak kejayaan perekonomian kota-kota besar tersebut, tak terkecuali Surabaya. Tidak sampai situ, agresi militer yang dilakukan oleh praktisi kolonialisme pun menambah suram Surabaya hingga mencapai titik nadir. Akibatnya, Surabaya butuh waktu lama untuk bangkit dari keterpurukan.

Kemerdekaan, yang seyogianya dapat merubah situasi ekonomi politik yang kacau balau menjadi lebih baik, malah menjadikan struktur sosial di tatanan masyarakat kian berantakan. Momentum proklamasi yang dibacakan sang dwi tunggal, Soekarno-Hatta, naga-naganya gagal menjadikan masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya, merdeka dalam artian yang sesungguhnya: merdeka secara finansial, sosial, politik. Ironisnya, kekacauan baru justru muncul. Para aristokrat-aristokrat lama yang masih punya kuasa justru bersinergi dengan negara (dalam hal ini direpresentasikan oleh otoritas setempat) dalam mengkooptasi ruang-ruang kota Surabaya. Tempat-tempat strategis di ruang kota yang pada masa kolonial dimonopoli dan terbatas untuk kalangan Eropa dan bangsawan nyatanya terus dipelihara.

Buku *Merebut Ruang Kota* yang ditulis oleh Basundoro mencoba membangun narasi-narasi utuh tentang hal tersebut. Rakyat miskin, yang sejatinya juga elemen dari negara, dalam setiap babakan sejarah harus berhadapan vis-à-vis dengan koalisi kolutif borjuis dengan negara dalam penguasaan ruang-ruang di kota Surabaya. Lebih spesifik, rakyat miskin yang kerap terlibat dalam kontes berebut ruang di kota lebih sering melibatkan rakyat miskin Bumiputera tinimbang rakyat miskin non-Bumiputra seperti orang Arab dan orang Tiongkok.

Lewat kasus-kasus persidangan tentang hak atas tanah di kota yang terjadi sepanjang tahun 1900-1960, Basundoro berhasil memotret wajah negara yang represif nan bengis terhadap kaum miskin perkotaan. Secara bertahap, ia menjelaskan bahwa di masa kolonial persengkokolan yang dilakukan oleh negara dengan pengusaha dilakukan dengan tujuan untuk merawat kemiskinan di Surabaya. Hal ini mereka lakukan agar tenaga kerja murah tetap bertahan dan mudah didapatkan. Kemudian, dengan tidak memberi akses akses ruang-ruang kota terhadap rakyat miskin secara tidak langsung membuat rakyat miskin terus bergantung pada sumber-sumber pendapatan yang hanya bisa didapatkan dari para borjuis.

Pada bab 6, Basundoro pun mencoba mempertontonkan kepada para pembaca bagaimana rakyat miskin dikontrol sedemikian rupa oleh negara untuk kepentingan para borjuis dan masyarakat Eropa di Surabaya. Dibentuknya *gemeente* oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi salah satu taktik dalam merebut kampung-kampung yang telah diduduki oleh masyarakat miskin. Serangkaian cara pun dilakukan untuk “mengusir” rakyat miskin dari ruang kota. Mulai dari penarikan pajak, upaya membawa kasus sengketa lahan yang terjadi antara negara dengan rakyat miskin ke meja hijau, hingga “penataan” kampung-kampung kumuh di Surabaya karena dianggap merusak pemandangan kota, paling tidak dicatat oleh Basundoro dalam bab 3-6 buku ini.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah rupanya menimbulkan reaksi pertentangan dari masyarakat miskin kota Surabaya. Basundoro menilai ada dua upaya spontan yang dilakukan oleh rakyat miskin dalam merespon kesewenang-wenangan pemerintah dan para borjuis yang umumnya menjadi tuan tanah partikelir. Upaya pertama adalah upaya bertahan yang berlangsung sampai menjelang periode Jepang. Upaya yang dilakukan masyarakat miskin

dalam merebut ruang kota dalam periode ini melibatkan rakyat miskin yang telah lama menjadi penghuni kota Surabaya, para tuan tanah pemilik tanah partikelir, serta *Gemeente* Surabaya.

Pada periode ini, perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat miskin sifatnya sangat reaksioner dan spontan. Mereka baru berjuang baru setelah pemerintah melakukan inisiasi-inisiasi yang mengancam keberadaan mereka. Bila tidak begitu mengancam, masyarakat miskin akan membiarkan pemerintah kolonial, baik Belanda maupun Jepang, untuk berakrobat lebih bebas.

Pada perkembangan selanjutnya, upaya lain yang dilakukan oleh rakyat miskin kota Surabaya adalah upaya menyerang yang dimulai sejak awal kemerdekaan sampai 1960an. Pada periode ini terjadi eskalasi pengambilalihan ruang kota Surabaya yang dilakukan oleh rakyat miskin secara massif, baik dari segi pelaku maupun dari segi area yang diperebutkan. Perebutan ruang tidak lagi sebatas di ruang-ruang privat tetapi menjalar ke ruang-ruang publik.

Dalam catatan Basundoro, meskipun rakyat miskin kerap mengalami kekalahan dalam perebutan ruang kota, namun ada beberapa kasus dimana rakyat miskin menang. Namun, cliché, rakyat miskin menang karena memang lahan yang diperjuangkan mereka tidak punya nilai ekonomi yang tinggi untuk dikomersialisasi. Sehingga, daripada pemerintah dan penguasa tanah mengeluarkan uang banyak untuk mengusut tuntas kasus tersebut di meja hijau, lebih baik mereka menyerahkannya kepada rakyat miskin kota.

Simbolisme Kota Surabaya

Terinspirasi oleh konsep simbolisme kota (*urban symbolism*)¹ yang dicetuskan Peter Nas tahun 1993 buku *Negara di Tengah Kota* ini seakan menjadi karya nostalgia setelah kajian-kajian mengenai simbolisme kota sudah jarang ditulis oleh sejarawan lokal. Sejauh ini, masih sedikit sejarawan Indonesia yang menulis tentang sejarah simbolisme kota, terutama kota Surabaya. Agaknya, tidak berlebihan juga untuk mengatakan bahwa karya Husein ini menjadi semacam oase di tengah keringnya tulisan tentang historiografi simbolisme kota-kota di Indonesia.

Dalam menulis buku ini, Husein dibimbing oleh asumsi awal yang terbilang sederhana: setiap perpindahan kekuasaan akan mengakibatkan terjadinya perubahan, penciptaan, dan pelestarian simbol-simbol yang ada di kota. Beberapa simbol yang ada kota sangat mudah kita temukan. Beberapa diantaranya yang sangat kentara adalah monumen, patung, dan bangunan-bangunan penting pada masanya. Husein mencatat setidaknya terdapat lebih kurang 14 monumen dan patung yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada kisaran tahun 1900an di kota Surabaya.

Selain pada monumen, patung, dan tugu, nama jalan juga menjadi media lain yang digunakan untuk merepresentasikan kekuasaan. Jalan-jalan yang terletak di sebelah barat Jembatan Merah yang merupakan tempat kediaman orang-orang Eropa misalnya, diberi nama dengan nama-nama Belanda seperti Heerenstraat, Willemstraat, dan Werfstraat. Ketika kota ini berkembang ke arah selatan, tempat terdapat pemukiman elite orang-orang Belanda, yakni sekitar Darmo Boulevard, nama-nama gubernur jenderal juga menghiasi nama-nama jalan di wilayah itu, seperti Altingstraat atau J.B. van Heutszstraat. Jalan-jalan sebelah timur Jembatan Merah yang dihuni oleh orang-orang Tiongkok diberi nama seperti Chinesevorstraat,

¹ Konsep *urban symbolism* salah satunya digagas oleh Peter Nas (2011). Bersama dengan rekan-rekannya, Nas menawarkan beberapa konsep urban symbolism yang dapat digunakan dalam membaca simbolisme kota, yakni 1) *material symbolism*; 2) *discursive symbolism*; 3) *iconic symbolism*, dan 4) *behavioural symbolism*. (Lihat Nas, 2011).

Tepekongstraat, dan Tienstraat, dan seterusnya. Sementara itu, di wilayah hunian orang-orang Arab dan Melayu, nama-nama jalan diberi nama Jalan Ampel, Mas Mansur, dan lain-lainnya.

Satu hal menarik dari pemberian nama jalan pada masa Pemerintah Belanda adalah dipertahankannya sebagian besar nama-nama lokal yang mungkin sudah ada sejak abad ke-19. Husein mencatat secara rinci paling tidak dari 113 nama jalan pada tahun 1940, hanya terdapat lebih kurang 21% atau 236 nama jalan yang berbahasa Belanda, dan sebagian besar mempergunakan nama-nama lokal seperti Blimbingstraat, Dinojo, Djagalan, Gembong, Kaliasin, Kalianjar, dan sebagainya. Di masa pendudukannya yang singkat, sepertinya Jepang tidak punya niatan untuk meninggalkan jejak dalam bentuk simbol-simbol kota. Adapun bangunan yang dibuat oleh Jepang saat itu sifatnya sangat taktis dan fungsionalis untuk persiapan Perang Asia Raya. Bahkan, dicatat oleh Husein hanya satu nama jalan yang berubah pada saat masa pendudukan Jepang, yakni jalan Prambanan menjadi Jalan Kempetai.

Pasca kemerdekaan, nama-nama jalan pun kembali berubah. Nama pahlawan baik di tingkat nasional maupun lokal dipilih untuk menghiasi nama-nama jalan di kota Surabaya, bahkan kota-kota lain di Indonesia, sampai sekarang. Perubahan dan pengabdian nama dari mereka yang dianggap berjasa bagi negara dan Kota Surabaya terus berlangsung hingga tahun 1990-an. Pun demikian, menurut Husein, perubahan nama jalan ini tidak berarti nir-konflik. Dalam beberapa kasus, ada nama-nama jalan yang dipaksa untuk kembali menjadi namanya yang semula seperti Jalan Darmo dan Jalan Jemursari.

Sebagai salah satu simbol kekuasaan, lambang kota juga tidak luput dari berbagai upaya untuk mengubahnya. Sampai saat ini, lambang Kota Surabaya yang berintikan gambar Ikan Hiu (*Sura*) dan Buaya (*Baya*) sudah tiga kali mengalami perubahan. Simbol Banteng dan Singa yang mencengkram tulisan *Sura-Ing-Baya* menunjukkan dengan jelas siapa penguasa kota ketika itu (baca: Partai Nasional Indonesia). Setelah melalui serangkaian perdebatan di parlemen, akhirnya pada tahun 1956, Dewan Perwakilan Daerah Sementara Kota Besar Surabaya (DPRD-KBS) memutuskan untuk mempergunakan lambang Kota Surabaya seperti sekarang ini.

Masih ada beberapa simbol kota yang kiranya menjadi media bagi negara untuk merepresentasikan keberadaannya. Tempat ibadah sebagai simbol agama menempati posisi penting bagi negara dalam mewujudkan eksistensinya. Hal ini tercermin dari banyaknya masjid, gereja, dan klenteng yang tersebar di banyak tempat.

Negara di Tengah Kota berhasil menggambarkan sebuah realitas sosial bagaimana negara, dari masa kolonial sampai kemerdekaan, punya kepentingan dalam membubuhi ruang-ruang kota. Terutama pada masa kolonial Belanda dan Kemerdekaan, negara begitu peduli dalam mencipta simbol-simbol di ruang kota. Kekuasaan, selain ditayangkan dari tingkat stabilitas pemerintahan, pun mematerialisasi dirinya ke permukaan lewat simbol-simbol kota dalam rangka merawat memori kolektif masyarakat kelak.

Fluktuasi Ekonomi di Surabaya

Buku terakhir yang ditinjau adalah *Surabaya, City of Work* karya Dick, seorang sejarawan ekonomi dari Australia. Kepiawaiannya dalam menganalisa situasi ekonomi kota dapat dilihat pada bab-bab yang menjelaskan tentang industri dan perdagangan. Namun, tidak berarti bab-bab lain yang ditulisnya seperti bab tentang tanah dan pemerintahan tidak bagus. Sebaliknya, patut diapresiasi.

Surabaya, bagi Dick, merupakan salah satu kota termaju dalam berbagai sisi di antara kota-kota lain di Jawa, dan bahkan Asia. Akses-akses transportasi yang sangat mudah, mulai dari laut, sungai, hingga darat, membuat Surabaya bisa menjadi pusat perdagangan di level Asia. Selain itu, beberapa kebijakan politik, seperti Hukum Agraria 1970 dan Politik Etis 1900 yang

diterapkan pemerintah kolonial, menjadi semacam stimulus bagi Surabaya untuk terus dipaksa tumbuh dalam menghadapi pelbagai tantangan zaman.

Berbagai rumah-rumah penduduk dan tempat pengolahan gula mulai bermunculan. Keterhubungan antar kota dan wilayah-wilayah penyokongnya (*hinterland*) semakin bertambah baik dengan dibuatkannya rel kereta api dan penggunaan kapal uap yang mulai semarak. Semakin banyak orang-orang Eropa yang berdatangan ke Surabaya. Hal ini berakibat pada mulai bermunculannya bank, perusahaan asuransi hingga rumah-rumah dagang di Surabaya. Sebelum depresi ekonomi pada tahun 1930, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa perekonomian Surabaya terus melejit, bahkan sampai ke dunia internasional.

Fenomena urbanisasi menjadi salah satu ciri khas kota yang maju. Begitupun arus urbanisasi yang terjadi di Surabaya. Pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Surabaya dari berbagai macam ras dan bangsa memaksa Surabaya harus terus membangun perumahan-perumahan baru. Meskipun tidak terlalu jelas digambarkan bagaimana perkembangan pembangunan perumahan di masa kolonial, namun Dick berhasil memberikan para pembaca gambaran bagaimana tingginya permintaan akan rumah yang sedari dulu sudah tinggi.

Sepanjang potret Surabaya satu abad oleh Dick, kita bisa melihat bagaimana fluktuasi ekonomi yang terjadi di Surabaya. Terpotret satu episode oleh Dick bahwa pada tahun 1920an asupan gula ke Surabaya berkurang drastis. Gula bahkan sempat menjadi komoditas yang tidak lagi primadona. Walaupun begitu, komoditas lain seperti teh dan karet malah menemukan momentumnya dan menjadi meledak di pasaran.

Surabaya pun sempat jatuh terperosok dan mengalami stagnasi pertumbuhan dari segala bidang. Semua perhatian mulai lari ke Jakarta dan Surabaya mendadak menjadi anak tiri. Dick mencatat, semenjak tahun 1930an sampai tahun 1950an menjadi tahun-tahun terburuk bagi Surabaya. Hampir setengah abad Surabaya terpukul mundur dan terlunta-lunta dalam kontestasi perekonomian dunia. Baru di tahun 1960-70an, ketika banyak perusahaan sudah dinasionalisasi oleh negara, Surabaya mulai bangkit kembali secara perlahan.

Tahun 1980an, bukti-bukti kebangkitan Surabaya mulai terlihat. Beberapa pengembang lahan seperti Ciputra dan Dharmala Group mulai berdatangan ke Surabaya. Surabaya mulai menjadi *hub* dalam produksi industri ekspor-impor di Indonesia, bahkan—meskipun dalam lingkup yang lebih kecil dari Asia—di Asia Tenggara.

Kebangkitan Surabaya tidak bisa dilepaskan dari bantuan kota-kota penyokongnya. Dick berpendapat, berkat daerah penyokongnya, Surabaya dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Terutama setelah program "Revolusi Hijau" rezim Suharto diberlakukan. Pasalnya, program tersebut berhasil meningkatkan produktivitas beras daerah-daerah penyokong Surabaya. Lebih jauh, bagi Dick, investasi-investasi domestik yang dilakukan oleh wilayah-wilayah penyokong Surabaya di Jawa Timur lebih berarti dalam rangka menumbuhkan perekonomian Surabaya, ketimbang investasi-investasi asing. Namun, bukan berarti Dick meniadakan peran bank dan pemberi modal asing bagi pengembangan usaha-usaha domestik.

Penggunaan data-data statistik dalam buku menjadi kelebihan tersendiri bila dibandingkan buku-buku sebelumnya. Kepiawaian penulis dalam mengekstraksi data-data tersebut patut diacungi jempol. Sebab, lewat data-data tersebut, para pembaca berhasil disugahi oleh dinamika ekonomi yang terjadi di Surabaya tempo dulu. Secara umum, *Surabaya, City of Work* kiranya bisa dijadikan salah satu rujukan utama bagi siapapun yang tertarik dengan isu-isu urban economic history di kota manapun, khususnya di Surabaya.

Membaca Ulang Surabaya

Pancaragam Surabaya tempo dulu, berdasarkan ketiga buku di atas, sarat dengan pertarungan ekonomi penuh intrik di dalamnya. Seolah tak bisa disanggah kembali bahwa kota sudah ditakdirkan untuk selalu menjadi arena pertarungan beragam kepentingan ekonomi dan

politik kelompok-kelompok tertentu. Surabaya seakan tidak pernah ramah kepada masyarakatnya, terutama kepada masyarakat yang termarginalisasi. Narasi-narasi tentang perebutan kekuasaan dan sumber daya ekonomi santer terlihat. Namun, benarkah semata-mata begitu?

Beberapa pendekatan lain mungkin bisa digunakan untuk membaca ulang Surabaya. Kota, dalam artian yang luas, bukan hanya perubahan-perubahan yang sifatnya morfologis dari sebuah kota sebagaimana yang ditekankan oleh Husein. Kota juga bukan hanya wadah dimana fluktuasi ekonomi dan transaksi perdagangan terjadi secara deras dan massif sebagaimana dilukiskan secara gamblang oleh Dick. Kota yang dibayangkan oleh Basundoro barangkali lebih luwes sifatnya karena berhasil memotret bagaimana masyarakat kelas bawah ternyata punya peran signifikan dalam reka ulang historiografi kota. Dinamika masyarakat yang terjadi di Surabaya dapat dipotret sedemikian rupa sehingga bisa para pembaca bisa melihat narasi-narasi perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan haknya di kota Surabaya.

Sebagai catatan penutup, rasanya penting juga bagi kita sejarawan untuk memperluas cakrawala kala melihat kota yang sejatinya tersusun dari elemen-elemen penyusunnya. Membaca keragaman budaya yang melekat pada masyarakat kota misalnya dapat menjadi salah satu alternatif dalam melihat sejarah kota. Sebab, tak dinyana, membaca sejarah kota Surabaya lewat potret ekspresi budaya masyarakat yang ada di Surabaya dapat membawa kita ke tahapan lebih jauh dalam historiografi kota-kota di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fujita, Masahisa (2003). *Urban Economic Theory: Land Use and City Size*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Nas, Peter J.M. (2011). *Cities Full of Symbols: A Theory of Urban Space and Culture*. Leiden: Leiden University Press.
- . (1993) *Urban Symbolism*. Leiden; New York: E.J. Brill, 1993.
- Smith, Neil (2005). *The New Urban Frontier: Gentrification and The Revanchist City*. London; New York: Routledge.